

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah bagian penting dalam menjawab aspek keterkaitan perencanaan dan pembangunan yang dapat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007-2011

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2007 hingga tahun 2011, digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Dalam periode 2007–2011, pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp. 611,079,070,781.68 pada tahun 2007 menjadi Rp. 1,196,688,199,504.83 pada tahun 2011. Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 5 tahun, realisasi pendapatan daerah selalu melampaui target, kecuali untuk tahun 2009 yang hanya terealisasi sebesar 98,78 %. Berikut disampaikan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Tabel 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Provinsi Bangka Belitung Tahun 2007-2011

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	566,079,241,759.00	611,079,070,781.68	107.95%
2008	746,414,506,932.00	840,700,694,227.45	112.63%
2009	814,734,492,162.00	804,823,186,194.14	98.78%
2010	804,230,982,584.93	846,936,690,458.53	105.31%
2011	1,093,697,004,755.94	1,196,688,199,504.83	109.42%

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Kontribusi Pendapatan Daerah tersebar dalam 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Tabel 3.2
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011

Uraian	Rencana Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian	Kontribusi Terhadap Pendapatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Asli Daerah				
2007	206,573,771,759.00	204,753,116,546.68	99.11%	33.50%
2008	234,940,408,932.00	294,762,823,223.45	125.46%	35.06%
2009	255,289,242,162.00	246,947,013,404.14	96.73%	30.68%
2010	297,221,240,327.93	327,028,996,815.53	110.02%	38.61%
2011	364,496,034,465.94	462,399,264,365.83	126.85%	38.63%
Dana Perimbangan				
2007	359,785,000,000.00	406,325,954,235.00	112.94%	66.49%
2008	511,474,100,000.00	545,937,870,505.00	106.74%	64.93%
2009	559,465,250,000.00	557,876,172,790.00	99.72%	69.31%
2010	506,009,742,257.00	519,293,180,143.00	102.63%	61.31%
2011	645,422,399,290.00	700,510,364,139.00	108.54%	58.53%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
2007	0	0	0	0%
2008	0	0	0	0%
2009	0	0	0	0%
2010	1,000,000,000.00	614,512,500.00	61.45%	0.07%
2011	83,778,571,000.00	33,778,571,000.00	40.32%	2.82%

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Jika dilihat dari sumber dananya dalam 5 tahun terakhir, Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 35,30%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori sedang. Dana perimbangan memberikan sumbangan rata-rata sebesar 64,11%, hal ini berarti ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih relatif besar, karena daerah tetap masih belum mampu sepenuhnya lepas dari ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio PAD terhadap realisasi belanja. PAD mampu membiayai rata-rata 35,08% dari kebutuhan belanja. Sedangkan dana perimbangan berkontribusi rata-rata sebesar 63,50%. Namun demikian, selama periode 2007-2011, *trend* kontribusi PAD terhadap APBD relatif naik sedikit yang menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan PAD cukup mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah, walaupun masih harus ditutupi dengan pendanaan lainnya.

Tabel 3.3
Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan
Tahun Anggaran 2007-2011

Uraian	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Kemampuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah			
2007	204,753,116,546.68	638,060,888,304.12	32.08%
2008	294,762,823,223.45	776,356,174,218.94	37.96%
2009	246,947,013,404.14	872,509,587,887.66	28.30%
2010	327,028,996,815.53	862,827,841,031.25	37.90%
2011	462,399,264,365.83	1,180,320,625,985.32	39.17%
Rata-Rata			35.08%
Dana Perimbangan			
2007	406,325,954,235.00	638,060,888,304.12	63.68%
2008	545,937,870,505.00	776,356,174,218.94	70.32%
2009	557,876,172,790.00	872,509,587,887.66	63.94%
2010	519,293,180,143.00	862,827,841,031.25	60.19%
2011	700,510,364,139.00	1,180,320,625,985.32	59.35%
Rata-Rata			63.50%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
2007	0	638,060,888,304.12	0%
2008	0	776,356,174,218.94	0%
2009	0	872,509,587,887.66	0%
2010	614,512,500.00	862,827,841,031.25	0.07%
2011	33,778,571,000.00	1,180,320,625,985.32	2.86%
Rata-Rata			0.58%

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

A. Pendapatan Asli Daerah

Selama Periode 2007-2011 realisasi PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Realisasi PAD sampai dengan tahun 2011 menurut jenis PAD dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sampai dengan 2011 menurut jenis PAD

No	Sumber Pendapatan	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4: 3)	(6 = 3 - 4)
1	Pajak Daerah	1,254,818,510,047.94	1,364,058,171,528.95	108.71	109,239,661,481.01
2	Retribusi Daerah	8,695,045,000.00	14,712,833,675.14	169.21	6,017,788,675.14

No	Sumber Pendapatan	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4: 3)	(6 = 3 - 4)
3	Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,730,345,112.30	9,888,665,254.23	209.05	5,158,320,141.93
4	Lain-lain PAD yang sah	89,977,265,486.63	147,231,543,897.31	163.63	57,254,278,410.68
	Jumlah	1,358,221,165,646.87	1,535,891,214,355.63	113.08	120,415,770,298.08

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

1) Pajak Daerah

Secara umum realisasi Pajak Daerah Tahun 2007-2011 tergambar pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Pajak Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	189,999,841,759.00	173,292,131,932.00	91.21	(16,707,709,827.00)
2008	221,790,548,432.00	260,567,539,859.00	117.48	38,776,991,427.00
2009	240,699,818,662.00	215,623,984,830.00	89.58	(25,075,833,832.00)
2010	266,346,721,274.00	296,214,788,747.00	111.21	29,868,067,473.00
2011	335,981,579,920.94	418,359,726,160.95	124.52	82,378,146,240.01
Jumlah	1,254,818,510,047.94	1,364,058,171,528.95	108.71	109,239,661,481.01

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pada periode 2007-2011 secara rata-rata, realisasi penerimaan dari pajak daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan realisasi rata-rata mencapai 108,71 persen, meskipun pada tahun 2007 dan 2009 realisasi penerimaan pajak daerah masih dibawah target.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada kepentingan pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi daerah mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena kinerjanya bersifat pemenuhan atas permintaan berbagai jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat. Perkembangan realisasi Retribusi Daerah 2007-2011, dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	698,900,000.00	1,482,185,657.00	212.07	783,285,657.00
2008	1,486,442,500.00	3,000,947,464.10	201.89	1,514,504,964.10
2009	2,221,007,500.00	4,045,359,479.10	182.14	1,824,351,979.10
2010	2,487,092,000.00	2,618,839,622.73	105.30	131,747,622.73
2011	1,801,603,000.00	3,565,501,452.21	197.91	1,763,898,452.21
Jumlah	8,695,045,000.00	14,712,833,675.14	169.21	6,017,788,675.14

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Pada komponen retribusi daerah, selama periode 2007 – 2012 realisasi pendapatan rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 169,21 persen dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 212,07 persen.

3) Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada perusahaan swasta. Realisasi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah selama periode 2007-2011 dapat dilihat pada tabel 3.7. berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	0.00	0.00	0.00	0.00
2008	568,416,000.00	1,023,524,053.23	180.07	455,108,053.23
2009	568,416,000.00	1,771,547,459.41	311.66	1,203,131,459.41
2010	1,793,513,112.30	3,077,327,809.00	171.58	1,283,814,696.70
2011	1,800,000,000.00	4,016,265,932.59	223.13	2,216,265,932.59
Jumlah	4,730,345,112.30	9,888,665,254.23	209.05	5,158,320,141.93

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

4) Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan lain-lain PAD utamanya bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Rekening Deposito pada bank dan Rupa-rupa

Pendapatan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD 2007-2011, secara rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 163,63 persen, meskipun pada tahun 2010 realisasi masih berada dibawah target yaitu sebesar 94,45 persen, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 271,93 persen.

Adapun gambaran mengenai perkembangan realisasi Penerimaan PAD yang sah adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Lain-lain PAD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	15,595,500,000.00	29,978,798,957.68	192.23	14,383,298,957.68
2008	11,095,000,000.00	30,170,811,847.12	271.93	19,075,811,847.12
2009	11,780,000,000.00	25,506,121,635.63	216.52	13,726,121,635.63
2010	26,593,913,941.63	25,118,040,636.80	94.45	(1,475,873,304.83)
2011	24,912,851,545.00	36,457,770,820.08	146.34	11,544,919,275.08
Jumlah	89,977,265,486.63	147,231,543,897.31	163.63	57,254,278,410.68

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007-2011 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 105,72 persen, meskipun pada tahun 2009 realisasi dana perimbangan masih dibawah target yaitu sebesar 99,72 persen, dengan rincian sebagaimana yang dapat dilihat pada table 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	359,785,000,000.00	406,325,954,235.00	112.94	46,540,954,235.00
2008	511,474,100,000.00	545,937,870,505.00	106.74	34,463,770,505.00
2009	559,465,250,000.00	557,876,172,790.00	99.72	(1,589,077,210.00)

2010	506,009,742,257.00	519,293,180,143.00	102.63	13,283,437,886.00
2011	645,422,399,290.00	700,510,364,139.00	108.53	55,087,964,849.00
Jumlah	2,582,156,491,547.00	2,729,943,541,812.00	105.72	147,787,050,265.00

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

1) Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011, dapat dilihat pada table 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Bagi Hasil Pajak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	16,350,000,000.00	33,011,238,644.00	201.90	16,661,238,644.00
2008	34,250,840,000.00	41,571,828,155.00	121.37	7,320,988,155.00
2009	40,345,840,000.00	44,007,940,457.00	109.08	3,662,100,457.00
2010	40,906,095,284.00	52,062,112,664.00	127.27	11,156,017,380.00
2011	52,365,735,594.00	55,995,923,193.00	106.93	3,630,187,599.00
Jumlah	184,218,510,878.00	226,649,043,113.00	123.03	42,430,532,235.00

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat terlihat bahwa secara rata-rata realisasi pada komponen Bagi Hasil Pajak mencapai 123,03 persen, dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 201,90 persen.

2) Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen pendapatan daerah yang meliputi Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan dan Bagi Hasil dari Pertambangan selama tahun 2007-2011, adapun realisasinya selama kurun waktu tersebut secara rata-rata mencapai 140,99 persen sebagaimana yang terlihat pada table 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	24,078,000,000.00	53,957,715,591.00	224.10	29,879,715,591.00

2008	64,148,820,000.00	93,494,502,350.00	145.75	29,345,682,350.00
2009	65,561,570,000.00	60,310,388,333.00	91.99	(5,251,181,667.00)
2010	43,220,413,973.00	48,516,960,479.00	112.25	5,296,546,506.00
2011	87,645,548,696.00	145,043,625,946.00	165.49	57,398,077,250.00
Jumlah	284,654,352,669.00	401,323,192,699.00	140.99	116,668,840,030.00

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun realisasi DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007-2011 adalah sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Dana Alokasi Umum / Penyeimbang DAU
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	319,357,000,000.00	319,357,000,000.00	100.00	0.00
2008	391,045,440,000.00	391,045,440,000.00	100.00	0.00
2009	407,994,840,000.00	407,994,844,000.00	100.00	4,000.00
2010	410,811,433,000.00	410,642,308,000.00	99.96	(169,125,000.00)
2011	481,589,915,000.00	481,589,915,000.00	100.00	0.00
Jumlah	2,010,798,628,000.00	2,010,629,507,000.00	99.99	(169,121,000.00)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Berdasarkan tabel 3.12, dapat dijelaskan bahwa DAU selama tahun 2007-2011 secara rata-rata sebesar 99,99 persen. Upaya peningkatan DAU secara terus menerus dilakukan, antara lain secara bersama-sama dengan provinsi yang tergabung di dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memasukkan luas wilayah laut sebagai dasar perhitungan alokasi DAU ke daerah.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Adapun DAK yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2007-2011 mencapai 91,80 persen. Hal ini bukan disebabkan karena kurangnya alokasi yang diberikan Pemerintah Pusat namun karena adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan mendapat alokasi DAK tidak dapat dilaksanakan. Secara periodik, realisasi DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007-2011 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus
Provinsi Kep. Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	0.00	0.00	0.00	0.00
2008	22,029,000,000.00	19,826,100,000.00	90.00	(2,202,900,000.00)
2009	45,563,000,000.00	45,563,000,000.00	100.00	0.00
2010	8,071,800,000.00	8,071,800,000.00	100.00	0.00
2011	23,841,200,000.00	17,880,900,000.00	75.00	(5,960,300,000.00)
Jumlah	99,505,000,000.00	91,341,800,000.00	91.80	(8,163,200,000.00)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang meliputi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Bidang Infrastruktur Jalan, Dana Penyesuaian Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) dan Sumbangan Pihak Ketiga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rata-rata selama tahun 2007-2011 masih sangat rendah yaitu sebesar 40,57 persen. Rendahnya pendapatan pada komponen ini disebabkan karena masih minimnya DPID dan PPID yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh sebab itu, dimasa yang akan datang diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui SKPD terkait agar dapat berperan aktif untuk memperoleh

dana sebagaimana dimaksud. Adapun Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2007-2011 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Lain-lain Pendapatan yang sah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	0.00	0.00	0.00	0.00
2008	0.00	0.00	0.00	0.00
2009	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	1,000,000,000.00	614,512,500.00	61.45	(385,487,500.00)
2011	83,778,571,000.00	33,778,571,000.00	40.32	(50,000,000,000.00)
Jumlah	84,778,571,000.00	34,393,083,500.00	40.57	(50,385,487,500.00)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2007 s/d Tahun 2011

No.	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN	611,079,070,781.68	840,700,694,227.45	804,823,186,194.14	846,936,690,458.53	1,196,688,199,504.83	119,95
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	204,753,116,546.68	294,762,823,223.45	246,947,013,404.14	327,028,996,815.53	462,399,264,365.83	125,39
1.1.1.	Pajak daerah	173,292,131,932.00	260,567,539,859.00	215,623,984,830.00	296,214,788,747.00	418,359,726,160.95	127,93
1.1.2.	Retribusi daerah	1,482,185,657.00	3,000,947,464.10	4,045,359,479.10	2,618,839,622.73	3,565,501,452.21	134,53
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0	1,023,524,053.23	1,771,547,459.41	3,077,327,809.00	4,016,265,932.59	119,32
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	29,978,798,957.68	30,170,811,847.12	25,506,121,635.63	25,118,040,636.80	36,457,770,820.08	107,20
1.2.	Dana Perimbangan	406,325,954,235.00	545,937,870,505.00	557,876,172,790.00	519,293,180,143.00	700,510,364,139.00	116,13
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	86,968,954,230.00	135,066,330,500.00	104,318,328,800.00	100,579,907,310.00	201,039,549,100.00	132,20
1.2.2.	Dana alokasi umum	319,357,000,000.00	391,045,440,000.00	407,994,844,000.00	410,642,308,000.00	481,589,915,000.00	111,17
1.2.3.	Dana alokasi khusus	0	19,826,100,000.00	45,563,000,000.00	8,071,800,000.00	17,880,900,000.00	117,26
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	614,512,500.00	33,778,571,000.00	1374,20

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Dilihat dari tabel di atas rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan daerah dari kurun waktu tahun 2007-2011 lebih dari 100 %, hal ini menunjukkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dan meningkat dari tahun ke tahun.

3.1.1.2 Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah pada periode 2007–2011 dipergunakan untuk upaya percepatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan setiap tahun.

Pemahaman terhadap tantangan pembangunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 yaitu *"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman, damai, sejahtera, adil, demokratis dan berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.

Mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kondisi daerah, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007 - 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan kemiskinan;
- 2) Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar;
- 3) Peningkatan pelayanan publik;
- 4) Perkuatan dan pengembangan kelembagaan ekonomi;
- 5) Pemantapan ketahanan pangan;
- 6) Pengembangan sektor unggulan;
- 7) Pengelolaan lingkungan hidup;
- 8) Pembinaan dan peningkatan kualitas masyarakat;
- 9) Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Perdesaan;
- 10) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Energi;
- 11) Peningkatan Investasi, Ekspor dan Kesempatan Kerja;
- 12) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan serta Kesehatan;
- 13) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

- 14) Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan;
- 15) Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi Serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan;
- 16) Peningkatan Infrastruktur Perhubungan, Kesehatan, Energi, Sosial Budaya dan Sarana Prasarana Berbasis Tata Ruang;
- 17) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing;
- 18) Visit Bangka Belitung Archipelago 2010;
- 19) Peningkatan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat;
- 20) Peningkatan pelayanan, aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
- 21) Peningkatan pelayanan, aksesibilitas dan kualitas kesehatan;
- 22) Peningkatan investasi, ekspor dan penyediaan lapangan/kesempatan kerja;
- 23) Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan pedesaan;
- 24) Perwujudan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan mengintensifkan segala sektor pendapatan yang dapat dijadikan sumberdaya untuk membiayai pembangunan daerah.

Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2007-2011 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
Kinerja Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	844,732,978,583.89	638,060,888,304.12	75.53	(206,672,090,279.77)
2008	971,399,105,648.01	776,356,174,218.94	79.92	(195,042,931,429.07)
2009	1,128,200,361,942.37	872,509,587,887.66	77.34	(255,690,774,054.71)
2010	1,044,353,996,355.68	862,827,841,031.25	82.62	(181,526,155,324.43)
2011	1,319,129,357,086.97	1,180,320,625,985.32	89.48	(138,808,731,101.65)
Jumlah	5,307,815,799,616.92	4,330,075,117,427.29	81.58	(977,740,682,189.63)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Berdasarkan tabel 3.16, dapat dijelaskan bahwa pada periode 2007-2011 jumlah anggaran yang di alokasikan di dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan berjumlah Rp.5,307,815,799,616.92 dengan realisasi sebesar Rp.4,330,075,117,427.29 atau 81,58 persen.

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.2.370.153.521.294.99 dengan realisasi sebesar Rp.2.018.178.394.869,41 atau 85,15 %, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	381,094,196,814.77	301,201,254,832.21	79.04	(79,892,941,982.56)
2008	447,634,031,806.65	375,262,891,510.85	83.83	(72,371,140,295.80)
2009	553,168,501,744.08	465,187,850,693.85	84.10	(87,980,651,050.23)
2010	441,555,963,566.06	380,003,252,009.21	86.06	(61,552,711,556.85)
2011	546,700,827,363.43	496,523,145,823.29	90.82	(50,177,681,540.14)
Jumlah	2,370,153,521,294.99	2,018,178,394,869.41	85.15	(351,975,126,425.58)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.757.753.460.064,50 dengan realisasi sebesar Rp.645.940.918.643,51 atau 85,24% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	86.036.373.150,14	69.914.395.880,10	81,26	(16.121.977.270,04)
2008	133.481.333.767,65	103.905.431.689,20	77,84	(29.575.902.078,45)
2009	146.954.300.127,63	128.900.908.527,05	87,71	(18.053.391.600,58)
2010	168.381.474.908,90	151.717.253.741,66	90,10	(16.664.221.167,24)
2011	222.899.978.110,18	191.502.928.805,50	85,91	(31.397.049.304,68)
Jumlah	757.753.460.064,50	645.940.918.643,51	85,24	(111.812.541.420,99)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga dalam APBD selama tahun 2007-2011 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.3.364.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.245.311.406,00 atau 66,75% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Belanja Subsidi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	864.000.000,00	0,00	0,00	(864.000.000,00)
2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1.000.000.000,00	993.560.940,00	99,36	(6.439.060,00)
2010	1.500.000.000,00	1.251.750.466,00	83,45	(248.249.534,00)
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.364.000.000,00	2.245.311.406,00	66,75	(1.118.688.594,00)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.443.961.075.689,45 dengan realisasi sebesar Rp.416.316.624.320,00 atau 93,77% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Belanja Hibah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	47.385.390.000,00	47.385.390.000,00	100,00	0,00
2008	102.694.432.000,00	101.747.894.000,00	99,08	(946.538.000,00)
2009	190.758.490.089,45	174.764.133.720,00	91,62	(15.994.356.369,45)
2010	35.230.008.000,00	26.508.951.000,00	75,25	(8.721.057.000,00)
2011	67.892.755.600,00	65.910.255.600,00	97,08	(1.982.500.000,00)
Jumlah	443.961.075.689,45	416.316.624.320,00	93,77	(27.644.451.369,45)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.231.399.617.920,82 dengan realisasi sebesar

Rp.177.613.477.944,00 atau 76,76% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	95.402.583.763,82	63.152.507.695,00	66,20	(32.250.076.068,82)
2008	54.953.966.157,00	45.847.667.991,00	83,43	(9.106.298.166,00)
2009	30.328.000.000,00	28.744.477.408,00	94,78	(1.583.522.592,00)
2010	25.340.064.000,00	17.946.770.850,00	70,82	(7.393.293.150,00)
2011	25.375.004.000,00	21.922.054.000,00	86,39	(3.452.950.000,00)
Jumlah	231.399.617.920,82	177.613.477.944,00	76,76	(53.786.139.976,82)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.648.645.481.639,43 dengan realisasi sebesar Rp.548.946.450.420,90 atau 84,63% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	112.650.849.900,81	91.861.390.257,11	81,55	(20.789.459.643,70)
2008	123.510.189.882,00	102.097.455.830,65	82,66	(21.412.734.051,35)
2009	155.875.473.709,38	106.455.806.098,80	68,30	(49.419.667.610,58)
2010	123.510.189.882,00	115.637.811.313,55	93,63	(7.872.378.568,45)
2011	133.098.778.265,24	132.893.986.920,79	99,85	(204.791.344,45)
Jumlah	648.645.481.639,43	548.946.450.420,90	84,63	(99.699.031.218,53)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

7) Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.270.377.214.426,00 dengan realisasi sebesar Rp.225.716.462.135,00 atau 83,48% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.23 berikut:

Tabel 3.23
Realisasi Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	33.755.000.000,00	28.887.571.000,00	85,58	(4.867.429.000,00)
2008	27.994.110.000,00	21.664.442.000,00	77,39	(6.329.668.000,00)
2009	26.372.393.000,00	24.828.964.000,00	94,15	(1.543.429.000,00)
2010	86.597.606.238,00	66.041.564.638,00	76,26	(20.556.041.600,00)
2011	95.658.105.188,00	84.293.920.497,00	88,12	(11.364.184.691,00)
Jumlah	270.377.214.426,00	225.716.462.135,00	83,48	(44.660.752.291,00)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.14.652.671.554,79 dengan realisasi sebesar Rp.1.399.150.000,00 atau 9,55% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.24
Realisasi Tidak Terduga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	5.000.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000.000,00)
2008	5.000.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000.000,00)
2009	1.879.844.817,62	500.000.000,00	26,60	(1.379.844.817,62)
2010	996.620.537,16	899.150.000,00	90,22	(97.470.537,16)
2011	1.776.206.200,01	0,00	0,00	(1.776.206.200,01)
Jumlah	14.652.671.554,79	1.399.150.000,00	9,55	(13.253.521.554,79)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 - 2011 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp.2.937.662.278.321,93 dengan realisasi sebesar Rp.2.311.896.722.557,48 atau 78,70 persen, sebagaimana yang dapat terlihat pada tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Belanja Langsung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	463,638,781,769.12	336,859,633,471.91	72.66	(126,779,148,297.21)
2008	523,765,073,841.36	401,093,282,708.09	76.58	(122,671,791,133.27)
2009	575,031,860,198.29	407,321,737,193.81	70.83	(167,710,123,004.48)
2010	602,798,032,789.62	482,824,589,022.04	80.10	(119,973,443,767.58)
2011	772,428,529,723.54	683,797,480,161.63	88.53	(88,631,049,561.91)
Jumlah	2,937,662,278,321.93	2,311,896,722,557.48	78.70	(625,765,555,764.45)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.259.037.559.544,89 dengan realisasi sebesar Rp.204.455.184.410,14 atau 78,93% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.26 berikut:

Tabel 3.26
Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	54.591.380.872,00	34.538.427.219,00	63,27	(20.052.953.653,00)
2008	77.768.501.705,78	59.806.414.605,00	76,90	(17.962.087.100,78)
2009	48.310.640.075,11	36.599.433.830,00	75,76	(11.711.206.245,11)
2010	38.863.587.892,00	36.810.921.256,14	94,72	(2.052.666.635,86)
2011	39.503.449.000,00	36.699.987.500,00	92,90	(2.803.461.500,00)
Jumlah	259.037.559.544,89	204.455.184.410,14	78,93	(54.582.375.134,75)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.792.979.077.451,26 dengan realisasi sebesar Rp.640.907.579.178,15 atau 80,82% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.27 berikut:

Tabel 3.27
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	128.343.843.442,96	105.690.414.084,33	82,35	(22.653.429.358,63)
2008	153.702.016.659,90	106.043.315.293,00	68,99	(47.658.701.366,90)
2009	156.909.834.475,90	133.183.322.983,40	84,88	(23.726.511.492,50)
2010	166.972.695.541,50	132.651.662.642,00	79,45	(34.321.032.899,50)
2011	187.050.687.331,00	163.338.864.175,42	87,32	(23.711.823.155,58)
Jumlah	792.979.077.451,26	640.907.579.178,15	80,82	(152.071.498.273,11)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

3) Belanja Modal

Belanja Modal dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2007-2011 sebesar Rp.1.885.645.641.325,78 dengan realisasi sebesar Rp.1.466.533.958.969,19 atau 77,77% sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.28
Realisasi Belanja Modal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Target	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	280.703.557.454,16	196.630.792.168,58	70,05	(84.072.765.285,58)
2008	292.294.555.475,68	235.243.552.810,09	80,48	(57.051.002.665,59)
2009	369.811.385.647,28	237.538.980.380,41	64,23	(132.272.405.266,87)
2010	396.961.749.356,12	313.362.005.123,90	78,94	(83.599.744.232,22)
2011	545.874.393.392,54	483.758.628.486,21	88,62	(62.115.764.906,33)
Jumlah	1.885.645.641.325,78	1.466.533.958.969,19	77,77	(419.111.682.356,59)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Adapun proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.29
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Belanja Tidak Langsung	84.10 %	86.06%	90.82%
1	Belanja Pegawai	87.71%	90.10%	85.91%

No	Uraian	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Belanja Bunga	0%	0%	0%
3	Belanja Subsidi	99.36%	83.45%	0
4	Belanja Hibah	91.62%	75.25%	97.08%
5	Belanja Bantuan Sosial	94.78%	70.82%	86.39%
6	Belanja Bagi Hasil	68.30%	93.63%	99.85%
7	Belanja Bantuan Keuangan	94.15%	76.26%	88.12%
8	Belanja Tidak Terduga	26.60%	90.22%	0%
B	Belanja Langsung	70.83%	80.10%	88.53%
1	Belanja Pegawai	75.76%	94.72%	92,90%
2	Belanja Barang dan Jasa	84.88%	79.45%	87.32%
3	Belanja Modal	64.23%	78.94%	88.62%

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Dari tabel 3.29 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terhadap anggaran belanja dari ke tahun semakin meningkat akan tetapi masih terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan realisasi belanja pada beberapa komponen belanja, hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah cukup baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Pembiayaan Daerah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007-2011 dianggarkan sebesar Rp.1.309.963.451.294,39 dengan realisasi sebesar Rp.1.325.963.451.293,96 atau 101,22 persen dengan uraian sebagai yang dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut:

Tabel 3.30
Realisasi Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	280,249,792,799.24	281,249,792,799.24	100.36	1,000,000,000.00
2008	250,692,422,613.00	250,692,422,612.57	100.00	(0.43)
2009	313,465,869,780.37	313,465,869,780.37	100.00	0.00
2010	240,123,013,770.75	255,123,013,770.75	106.25	15,000,000,000.00
2011	225,432,352,331.03	225,432,352,331.03	100.00	0.00
Jumlah	1,309,963,451,294.39	1,325,963,451,293.96	101.22	15,999,999,999.57

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

A. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan penerimaan mencakup komponen: 1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pembiayaan Penerimaan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011 dianggarkan sebesar Rp. 1,364,918,174,402.39 dengan realisasi sebesar 100 % sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.31 berikut:

Tabel 3.31
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 - 3)
2007	290,197,792,799.24	290,197,792,799.24	100.00	0.00
2008	254,692,422,613.00	254,692,422,612.57	99,57	(0.43)
2009	315,465,869,780.37	315,465,869,780.37	100.00	0.00
2010	264,129,736,878.75	264,129,736,878.75	100.00	0.00
2011	240,432,352,331.03	240,432,352,331.03	100.00	0.00
Jumlah	1,364,918,174,402.39	1,364,918,174,401.96	100.00	(0.43)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan pengeluaran mencakup komponen: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman. Adapun pembiayaan pengeluaran dalam APBD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007-2011 dianggarkan sebesar Rp54.954.723.108,00 dengan realisasi sebesar Rp38.954.723.108,00 atau 70,89 persen sebagaimana yang tergambar dalam tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
(1)	(2)	(4)	(4 = 3: 2)	(5 = 2 – 3)
2007	9,948,000,000.00	8,948,000,000.00	89.95	(1,000,000,000.00)
2008	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	100.00	0.00
2009	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	0.00
2010	24,006,723,108.00	9,006,723,108.00	37.52	(15,000,000,000.00)
2011	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	100.00	0.00
Jumlah	54,954,723,108.00	38,954,723,108.00	70.89	(16,000,000,000.00)

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

3.1.2 Neraca Daerah

3.1.2.1 Pertumbuhan Neraca Daerah

Neraca merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai informasi neraca menyediakan gambaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai tingkat rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara ekonomis, efektif dan efisien atau memenuhi unsur *value for money*. Kinerja Neraca Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2007-2011 seperti terlihat pada Tabel 3.22 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

- Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2007-2011, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 5,04% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 5,04% dalam lima tahun terakhir. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi dan aset tetap. Aset lancar berupa kas, piutang, persediaan. Investasi berupa investasi jangka panjang. Sementara Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan.
- Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai -2,31%, meskipun piutang menurun sebesar -106,69%. Hal ini disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas dan persediaan, mengalami pertumbuhan sebesar -2,38% dan -109,74%. Melihat komposisi selama periode 2007-2011, pertumbuhan aset lancar menunjukkan bahwa kondisi aset lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kondisi cukup sehat karena aset lancar yang pada umumnya berupa pendanaan tunai telah tersebar dalam bentuk investasi dengan rata-rata pertumbuhan 24,45%. Selain itu aset lancar memiliki karakteristik yang likuid, maka dengan sendirinya akan berfluktuasi sesuai dengan penggunaannya. Bentuk investasi yang dilakukan berupa aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya) dengan rata-rata pertumbuhan 5,49%.
- Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga

terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2007-2011 dengan rata-rata sebesar - 37,08%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang baik secara tepat waktu.

- Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2007-2011, merupakan kewajiban jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga sebesar 27,34%, dan utang jangka pendek lainnya yang meningkat sebesar 31,60%, kewajiban jangka pendek ini masih bisa ditutupi dengan aset lancar yang dimiliki, dengan membandingkan rasio utang dengan rasio total aset sebesar 1,02:1, dan dalam kurun waktu 2007-2011, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kewajiban tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar dan Dana Investasi merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2007-2011 mengalami pertumbuhan sebesar 5,17% yang berarti bahwa ekuitas dana cukup sehat.

Tabel 3.33
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	-2,31
1.1.1.	Kas	-2,38
1.1.2.	Piutang	-106,69
1.1.3.	Persediaan	-109,74

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.2	INVESTASI	24,45
1.3.	ASET TETAP	5,49
1.3.1.	Tanah	3,81
1.3.2.	Peralatan dan mesin	20,78
1.3.3.	Gedung dan bangunan	16,00
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	14,76
1.3.5.	Aset tetap lainnya	10,95
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	10,95
1.4.	ASET LAINNYA	-1.565,99
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	-12,31
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	0,00
1.4.4.	Aset tak berwujud	0,00
1.4.5.	Aset Lain-Lain	21,06
JUMLAH ASET DAERAH		5,04
2.	KEWAJIBAN	37,08
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	27,24
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	0,00
2.1.2.	Uang bunga	0,00
2.1.3.	Utang Pajak	0,00
2.1.4.	Bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri	52,59
2.1.5.	Pendapatan diterima dimuka	15,05
2.1.6.	Utang jangka pendek lainnya	31,60
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
2.2.1.	Utang dalam negeri	0,00
2.2.2.	Uang luar negeri	0,00
2.2.3.	Utang jangka panjang lainnya	0,00
3.	EKUITAS DANA	5,17
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	-8,35
3.1.1.	SILPA	-2,32
3.1.2.	Cadangan piutang	-106,69
3.1.3.	Cadangan persediaan	-109,74
3.1.4.	Pendapatan yang Ditangguhkan	27,34
3.1.5.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-4,56
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	13,87
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	13,68
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-1565,99
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	24,45
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		5,68

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2007-2011.

3.1.2.2 Rasio Neraca

A. Rasio Likuiditas

Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Data Rasio Likuiditas selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2007– 2011 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.34
Rasio Likuiditas Neraca Daerah Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

Rasio Likuiditas	Rumus	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Lancar	Aset Lancar/ Kewajiban Jangka Pendek	44.34	9.8	12.38	6.34	4.40
Quick Rasio	(Aset Lancar - Persediaan)/ Kewajiban Jangka Pendek	44.00	9.75	12.25	6.30	4.23
Rasio total hutang terhadap total aset	Total hutang/Total Aset	0.32	1.61	1.04	103.38	102.11
Rasio Hutang Terhadap Modal	Total Hutang/Total Ekuitas	0.32	1.64	1.05	101.91	102.47

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2007-2011.

B. Rasio Solvabilitas

Ratio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2007–2011 sebagaimana pada tabel 3.35 berikut:

Tabel 3.35
Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

Rasio Solvabilitas	Rumus	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Kewajiban terhadap Total Aset	Kewajiban/Total Aset	0.32	1.61	1.04	103.38	102.11
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	Kewajiban/Total Ekuitas	0.32	1.64	1.05	101.91	102.47

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2007-2011.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2007-2011, rata-rata realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung adalah 81,58%. Sedangkan rata-rata penganggaran untuk belanja pegawai selama periode 2007-2011 sebesar 13,99%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Secara rinci proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut:

Tabel 3.36
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase belanja pegawai terhadap pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
T.A 2007	86.036.373.150,14	844,732,978,583.89	10.19%
T.A 2008	133.481.333.767,65	971,399,105,648.01	13.74%
T.A 2009	146.954.300.127,63	1,128,200,361,942.37	13.03%
T.A 2010	168.381.474.908,90	1,044,353,996,355.68	16.12%
T.A 2011	222.899.978.110,18	1,319,129,357,086.97	16.90%
Rata-rata			13.99%

Sumber : Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2007-2011

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun tahun 2007-2011 sebesar 92-95% yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi.

Defisit riil anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diuraikan pada tabel 3.37 berikut:

Tabel 3.37
Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	804,823,186,194.14	846,936,690,458.53	1,196,688,199,504.63
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	872,509,587,887.66	862,827,841,031.25	1,180,320,625,985.32
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,000,000,000.00	9,000,723,108.00	15,000,000,000.00
	Defisit riil	(69,686,401,693.52)	(24,891,873,680.72)	1,367,573,519.31

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2009 dan 2010 terjadi defisit anggaran dikarenakan komposisi pendapatan lebih kecil dari belanja, untuk menutupi defisit anggaran tersebut terdapat komposisi penutup anggaran seperti pada tabel 3.38 berikut :

Tabel 3.38
Komposisi Penutup Defisit Anggaran
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	28,35	10,35	0,56
2.	Pencairan Dana Cadangan	0%	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	87,10	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0%	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

Dilihat dari tabel di atas defisit riil anggaran pada tahun 2009-2011 dapat ditutupi dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. adapun realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 3.39 berikut:

Tabel 3.39
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2009		2010		2011	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah SILPA	245,779,468,086.85	100	240,433,878,531.03	100	241,779,925,850.54	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	(8,322,228,757.86)	-3,38	29,807,756,487.60	12,39	97,903,229,879.89	40,49
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(1,589,077,210.00)	-0,64	13.283,437,886.00	5,52	55,087,964,849.00	22,78
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0	(385,487,500.00)	-0,16	(50,000,000,000.00)	-20,67
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	255,690,774,054.71	104,03	181,526,155,324.43	75,49	138,808,731,102.05	57,41
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0
7.	Kegiatan lanjutan	0		0		0	

Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2011

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan memperhatikan pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan mewujudkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah

meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2012–2017 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan asas pemerataan pembangunan; dan (4) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang taat. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan atau menata kembali Kelembagaan dan Sistem Operasional yang berkenaan dengan pendapatan daerah.
2. Melakukan peninjauan kembali terhadap perda terkait dengan retribusi dan pajak daerah, guna mengoptimalkan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta *cost effectiveness*.
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

7. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah, terutama optimalisasi retribusi
8. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan asset dan keuangan daerah.
9. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
10. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
11. Meningkatkan koordinasi dengan pusat sebagai upaya untuk menambah dana perimbangan keuangan daerah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dengan mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan dan dana yang dikucurkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang masih baru dimekarkan.
12. Mencari alternatif pendanaan atau pinjaman luar Negeri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta efektivitasnya dalam pembiayaan proyek-proyek yang produktif.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2017 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan melalui:

1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
2. Melakukan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
3. Melakukan kajian penerapan insentif pajak yang tepat untuk mendorong pengusaha untuk berinvestasi pada sektor-sektor strategis daerah.
4. Menjalankan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan sumber penerimaan lain, melalui pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*. Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:
 - a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi dan kepastian berusaha di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati.
 - c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat dan pengusaha lokal.
 - d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
 - e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
 - f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

3.1.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Strategi belanja daerah tahun 2012-2017 diarahkan untuk mendukung:

- a. Pencapaian pembangunan nasional 2010-2014 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (11+3);
- b. *Dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui keseimbangan pembangunan desa–kota dan SATAM EMAS;
- c. Peningkatan sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Untuk itu, kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2012-2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung *dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.
2. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
9. Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di pedesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan

lindung sebesar 30%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*).
14. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna

memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;

- f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu mendukung keseimbangan pembangunan desa dan kota serta mengaplikasikan kebijakan SATAM EMAS.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga terdapat peluang bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.40 berikut ini:

Tabel 3.40
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Tidak Langsung	496,523,145,823.29	115,22
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	191,502,928,805.50	129,14
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	0	0
3	Belanja Bunga	0	0
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	132,893,986,920,79	109,73
5	Belanja Subsidi	0	31,49
6	Belanja Hibah	65,910,255,600.00	162,57
7	Belanja Bantuan Sosial	21,922,054,000.00	79,96
8	Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	84,293,920,497.00	145,80
9	Belanja Tidak Terduga	0	44,95
B	Belanja Langsung	683,797,480,161.63	120,19
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	36,699,987,500.00	108,65
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	0
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	640,907,579,178.15	112,16
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0	0
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	0	0
6	Belanja Modal	483,756,628,486.21	126,72
C	Pembiayaan Pengeluaran	15,000,000,000.00	177,89

No	Uraian	2011 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2	Pembayaran pokok utang	0	0
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	15,000,000,000.00	177,89
4	Pemberian Pinjaman	0	0
TOTAL (A+B+C)		1,195,320,625,984,92	117,36

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Jika memperhatikan kinerja pendapatan daerah pada 2007-2012, pendapatan daerah akan diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun kondisi perekonomian Bangka Belitung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memaksimalkan strategi dan kebijakan pendapatan daerah yang telah diuraikan diatas dalam meningkatkan Pertumbuhan dan realisasi PAD. Hal ini dapat dipahami karena disparitas PAD memiliki kecenderungan yang tinggi akibat kepastiannya masih rendah. Selama ini pendapatan daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor yang bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan (terbatas oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur), sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Jika memperhatikan proyeksi perekonomian nasional yang akan mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3%-6,8% pada periode 2010-2014 dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami penurunan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam, maka pendapatan daerah pada tahun 2012 – 2017 diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 77-83%.

Prediksi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2012 – 2017 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 18,74%. Sedangkan untuk pajak daerah diprediksi akan mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 0,92%

pertahun, dengan asumsi kondisi perekonomian stabil. Jika diperhatikan prediksi pajak daerah akan tetap tumbuh stabil dalam kisaran 4,27%.

Demikian juga dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dengan asumsi pertumbuhan sebesar sama dengan pajak daerah yaitu sebesar 4,08%, maka walaupun prosentasenya sangat kecil namun terus mengalami stabilitas sebesar 1,02%.

Tabel 3.41
Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah
Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017

Tahun	Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD %
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	1.278.302.334.711,00	446.808.187.539,90	34,95%
2013	1.391.840.758.163,25	399.836.803.770,99	28,72%
2014	1.454.559.304.440,36	430.313.913.845,86	29,58%
2015	1.518.962.470.884,84	460.791.023.920,73	30,33%
2016	1.584.944.856.569,46	491.268.133.995,60	30,99%
2017	1.652.775.195.549,38	521.745.244.070,46	31,56%

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Tabel 3.42
Prediksi PAD dan Retribusi Daerah
Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017

Tahun	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	1.278.302.334.711,00	3.807.955.550,96	0,30%
2013	1.391.840.758.163,25	4.591.260.198,00	0,32%
2014	1.454.559.304.440,36	5.013.909.569,00	0,34%
2015	1.518.962.470.884,84	5.529.095.805,00	0,36%
2016	1.584.944.856.569,46	5.951.745.176,00	0,37%
2017	1.652.775.195.549,38	6.466.931.176,00	0,39%

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Dalam era otonomi daerah, proporsi belanja daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Diperkirakan dalam periode 2012–2017, kebutuhan belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 9 – 15%. Hal ini disebabkan harapan masyarakat Bangka Belitung terhadap keseimbangan pembangunan antara desa dan kota serta mendukung pencapaian pembangunan nasional 2010-2014

dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (11+3). Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan *dedicated program* melalui keseimbangan pembangunan desa-kota dan SATAM EMAS sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, maka proporsional belanja langsung dan tidak langsung dalam periode 2012-2017 adalah 60-65% dan 35-40%.

Tabel 3.43
Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

TAHUN	JUMLAH BELANJA
(1)	(2)
2012	Rp 1,619,791,080,526.00
2013	Rp 1.488.304.676.729,34
2014	Rp 1.579.957.200.824,20
2015	Rp 1.667.948.241.780,81
2016	Rp 1.725.600.132.000,94
2017	Rp 1.783.945.913.947,79

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun tahun 2007-2011 sebesar 92 - 95% dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi.

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2007-2011, gambarannya seperti terlihat pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi
(1)	(2)
2007	254,267,975,276.80
2008	315,036,942,621.08
2009	245,779,468,086.85

Tahun	Realisasi
(1)	(2)
2010	240,433,878,531.03
2011	241,799,925,850.54
Jumlah	1,297,318,190,366.30

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2007-2011), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan tetap SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Jika memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada, maka merupakan modal pemerintah daerah untuk membiayai:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah serta melaksanakan amanat pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang

dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.45.

Tabel 3.45
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah untuk Mendanai
Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Proyeksi				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendapatan	1.391.840.758.163,25	1.454.559.304.440,36	1.518.962.470.884,84	1.584.944.856.569,46	1.652.775.195.549,38
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0
	Total penerimaan	1.391.840.758.163,25	1.454.559.304.440,36	1.518.962.470.884,84	1.584.944.856.569,46	1.652.775.195.549,38
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.488.304.676.729,34	1.579.957.200.824,20	1.667.948.241.780,81	1.725.600.132.000,94	1.783.945.913.947,79
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	(96.463.918.566,09)	(125.397.896.383,84)	(148.985.770.895,97)	(140.655.275.431,48)	(131.170.718.398,40)

Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terus mengecil hingga tahun 2017 mendatang, sedangkan proyeksi jumlah pengeluaran terus meningkat, maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta

(public private partnership) maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kepulauan Bangka Belitung;

3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan provinsi yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala regional dan lintas kabupaten/kota. Dengan reorganisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang makin ahli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat diuraikan pada Tabel 3.46. Sedangkan secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017, gambaran seperti terlihat pada Tabel 3.47.

Tabel 3.46
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proyeksi				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	96,463,918,566.09	125, 397,896,383.84	148,985,770,895.97	140,655,275,431.48	131,170,718,398.40
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	695,943,490,984.79	821,109,914,297.72	883,693,125,953.72	915,276,337,609.72	946,859,549,265.72
II.b	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	695,943,490,984.79	821,109,914,297.72	883,693,125,953.72	915,276,337,609.72	946,859,549,265.72
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	36,362,272,800.00	36,362,272,800.00	36,362,272,800.00	36,362,272,800.00	36,362,272,800.00
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	(60,101,645,766.09)	(89,035,623,583.84)	(112,623,498,095.97)	(104,293,002,631.48)	(94,808,445,598.40)
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	540,609,085,351.10	494,507,581,113.34	506,698,425,143.29	518,889,269,173.24	531,080,113,203.18
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	540,609,085,351.10	494,507,581,113.34	506,698,425,143.29	518,889,269,173.24	531,080,113,203.18
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	0	0	0	0	0
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	(60,101,645,766.09)	(89,035,623,583.84)	(112,623,498,095.97)	(104,293,002,631.48)	(94,808,445,598.40)

Sumber : Proyeksi dan Perhitungan, 2012

Tabel 3.47
Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proyeksi APBD					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	Pendapatan asli daerah	473.472.980.422,81	489.010.025.875,05	504.646.471.957,16	520.197.656.765,04	535.849.090.328,13	2.523.176.225.348,19
1.1.1	Pajak daerah	436.654.892.096,90	451.654.892.096,90	466.654.892.096,90	481.654.892.096,90	496.654.892.096,90	2.333.274.460.484,50
1.1.2	Retribusi daerah	4.591.260.198,00	5.013.909.569,00	5.529.095.805,00	5.951.745.176,00	6.466.931.176,00	27.552.941.924,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.906.601.353,95	2.020.997.435,19	2.142.257.281,30	2.270.792.718,18	2.407.040.281,27	10.747.689.069,89
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	30.320.226.773,96	30.320.226.773,96	30.320.226.773,96	30.320.226.773,96	30.320.226.773,96	151.601.133.869,80
1.2	Dana Perimbangan	887.393.378.805,00	887.393.378.805,00	887.393.378.805,00	887.393.378.805,00	887.393.378.805,00	4.436.966.894.025,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	126.082.690.805,00	126.082.690.805,00	126.082.690.805,00	126.082.690.805,00	126.082.690.805,00	630.413.454.025,00
1.2.2	Dana alokasi umum	717.140.118.000,00	717.140.118.000,00	717.140.118.000,00	717.140.118.000,00	717.140.118.000,00	3.585.700.590.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	44.170.570.000,00	44.170.570.000,00	44.170.570.000,00	44.170.570.000,00	44.170.570.000,00	220.852.850.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	181.976.850.000,00	181.976.850.000,00	181.976.850.000,00	181.976.850.000,00	181.976.850.000,00	909.884.250.000,00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	131.976.850.000,00	131.976.850.000,00	131.976.850.000,00	131.976.850.000,00	131.976.850.000,00	659.884.250.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Sumbangan pihak ketiga	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	250.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.542.843.209.227,81	1.558.380.254.680,05	1.574.016.700.762,16	1.589.567.885.570,04	1.605.219.319.133,13	7.870.027.369.373,19
2	BELANJA DAERAH						
2.1	Belanja Tidak Langsung	792.361.185.744,56	758.847.286.526,47	784.255.115.827,08	810.323.794.391,22	837.086.364.682,06	3.982.873.747.171,39
2.1.1	Belanja pegawai	251.752.100.393,46	264.339.705.413,13	277.556.690.683,79	291.434.525.217,98	306.006.251.478,88	1.391.089.273.187,24
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proyeksi APBD					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	213.682.015.575,00	213.682.015.575,00	213.682.015.575,00	213.682.015.575,00	213.682.015.575,00	1.068.410.077.875,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	18.500.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	159.934.721.508,40	172.125.565.538,34	184.316.409.568,29	196.507.253.598,24	208.698.097.628,18	921.582.047.841,45
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	157.555.559.888,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	557.555.559.888,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	5.736.788.379,70	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	25.736.788.379,70
2.2	Belanja Langsung	793.624.671.621,67	851.109.914.297,72	883.693.125.953,72	915.276.337.609,72	946.859.549.265,72	4.390.563.598.748,55
2.2.1	Belanja pegawai	51.362.272.800,00	51.362.272.800,00	51.362.272.800,00	51.362.272.800,00	51.362.272.800,00	256.811.364.000,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	212.972.861.933,28	212.972.861.933,28	212.972.861.933,28	212.972.861.933,28	212.972.861.933,28	1.064.864.309.666,40
2.2.3	Belanja modal	529.289.536.888,39	586.774.779.564,44	619.357.991.220,44	650.941.202.876,44	682.524.414.532,44	3.068.887.925.082,15
	Jumlah belanja	1.585.985.857.366,23	1.609.957.200.824,19	1.667.948.241.780,80	1.725.600.132.000,94	1.783.945.913.947,78	8.373.437.345.919,94
	Surplus/(defisit)	(43.142.648.138,42)	(51.576.946.144,14)	(93.931.541.018,64)	(136.032.246.430,90)	(178.726.594.814,65)	(503.409.976.546,75)

Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012